

**PENGARUH STRUKTUR *GOVERNANCE* DAN
ETNISITAS TERHADAP *FEE* AUDIT
(STUDI PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI
INDEKS KOMPAS 100)**

Rahmat Haryo Wibowo

Politeknik Bisnis Lamda, Samarinda Kalimantan Timur

Email: rahmat.wibowo@pertamina.com

Abstrak

Besar atau kecilnya fee audit menjadi perbincangan yang menarik, mengingat masih kurangnya riset mengenai faktor-faktor apa saja yang sebenarnya dapat memengaruhi besar kecilnya fee audit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah struktur governance yang diprosikan dengan independensi, ukuran, intensitas pertemuan dewan komisaris, keberadaan komite manajemen risiko serta independensi, ukuran, dan intensitas pertemuan komite audit menjadi faktor penentu besar kecilnya fee audit (professional fee). Selanjutnya penelitian ini juga menguji apakah variasi etnis pemilik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu besar kecilnya fee audit, dimana etnis dipisahkan menjadi dua yaitu etnis masyarakat asli dan etnis masyarakat keturunan atau pendatang. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda (multiple linier regression). Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari variabel-variabel yang diuji, terdapat empat variabel yang memberi pengaruh terhadap fee audit. keempat variabel tersebut antara lain dewan komisaris



Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Humanika
JINAH
Volume 2
Nomor 1
Singaraja, Desember 2012
ISSN 2089-3310

independen, komite manajemen risiko, komite audit independen, dan intensitas pertemuan komite audit.

Kata Kunci : Dewan komisaris, komite Audit, etnisitas, fee audit

Abstract

In Indonesia, the size of the audit fee to be an interesting conversation, given the lack of research on what factors that could affect the size of the audit fee. This study aimed to test whether the governance structure that is proxied to the independence, the size, the intensity of the board meeting, the existence and independence of the risk management committee, size, and intensity of audit committee meetings be the deciding factor on the size of audit fees (professional fee). Furthermore, this study also examined whether ethnic variation owner of the company also became one of the factors determining the size of the audit fee, which is separated into two ethnic ethnicity indigenous and ethnic descent communities or immigrants. The data used are secondary data from published financial statements. The number of companies that were visited in this study were as many as 78 companies. This study uses the technique of multiple regression analysis is the data (multiple linear regression). The test results showed that of the variables tested, there are four variables that influence the audit fee. four variables include an independent board of directors, risk management committee, an independent audit committee, and the intensity of audit committee meetings.

Keywords: Board of Commissioners, the Audit Committee, ethnicity, audit fee

I. LATAR BELAKANG

Di Indonesia besarnya *fee* audit masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan, Fachriyah (2010) menyatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit, misalnya (1) Besar kecilnya klien, (2) Lokasi kantor akuntan public, (3) Ukuran kantor akuntan public. Faktor-faktor tersebut dianggap akan sangat berpengaruh terhadap penentuan *fee* audit yang akan dibebankan kantor akuntan publik kepada kliennya. Untuk menghindari

penentuan *fee* audit yang tidak semestinya, maka IAPI menerbitkan surat keputusan No. KEP.0241/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *fee* audit. Surat Keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan *fee* audit.

Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris, kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Auditing No. 380 mengatur komunikasi antara akuntan publik (auditor eksternal) dengan komite audit. Standar ini menyatakan komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan maupun tertulis terkait dengan tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit, kebijakan akuntansi, konsultasi dengan akuntan lain, sampai pada kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

Penelitian sebelumnya yang terkait *fee* audit dilakukan oleh Beasley (1996), menyatakan hubungan negatif antara mekanisme *governance* dan keputusan pelaporan keuangan yang melanggar Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (GAAP). Carcello *et al.* (2002) menggunakan data dari Australia, menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur internal atau struktur *governance* yang lebih baik akan mengakibatkan permintaan kualitas audit yang lebih tinggi dan dengan demikian membayar biaya audit yang lebih tinggi.

Penelitian yang lain menemukan bahwa karakteristik komite audit dihubungkan dengan *fee audit* yang lebih tinggi (Abbot *et al.*, 2004). Abbot *et al.* (2004), menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan antara independensi dan keahlian komite audit terhadap *fee audit*, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap *fee audit*. Sementara Yatim, Kent dan Clarkson (2006) yang menguji antara *fee audit*, dewan komisaris, karakteristik komite audit, dan etnisitas menemukan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee audit*, independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

Lingkungan pasar modal di Indonesia menawarkan segmen modal yang dapat cukup jelas jika diidentifikasi berdasarkan garis etnis. Etnis yang sangat mencolok

selain masyarakat asli Indonesia adalah kelompok masyarakat pendatang atau keturunan, yaitu etnis Cina / Tiong Hwa. Walaupun ada etnis lain seperti Arab, India dan Eropa, namun etnis Cina dapat dikatakan mendominasi sebagian besar perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Etnis dapat dikatakan memiliki peran penting dalam mempengaruhi karakter dan perilaku ekonomi suatu perusahaan. Etnis sebenarnya merupakan sebuah modal yang tidak bisa diukur secara langsung untuk menjadi sebuah modal ekonomi.

Penelitian ini menguji hubungan antara biaya audit eksternal dan struktur *governance* internal perusahaan di pasar modal Indonesia yang masih merupakan salah satu Negara berkembang. Meskipun literatur dan penelitian mengenai *fee audit* saat ini cukup berkembang, namun dapat dikatakan masih belum ada penelitian yang meneliti hubungan antara struktur *governance*, etnisitas, dan biaya audit eksternal di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan memeriksa pengaruh antara struktur *governance* yang terdiri dari dewan komisaris dan komite audit, serta etnis pengendali terhadap *fee audit* di perusahaan *go publik* yang masuk dalam daftar Indeks Kompas 100.

II. KAJIAN TEORI

A. Teori Agensi

Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat : a) keinginan atau tujuan prinsipal dan agen yang saling berlawanan, dan b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen, sehingga prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan tugas yang didelegasikan secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan terhadap resiko.

Masalah keagenan tersebut dapat terjadi karena adanya *asymmetric information* antara pemilik dan manajer, yaitu kondisi saat salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. *Asymmetric*

information terdiri dari dua tipe, yang pertama adalah *adverse selection*. *Adverse selection* adalah tipe asimetri informasi di mana satu atau lebih pihak untuk transaksi bisnis atau transaksi potensial mempunyai keuntungan informasi lebih dari pihak lain. *Adverse selection* muncul karena beberapa orang, seperti manajer perusahaan dan pihak dalam lainnya lebih mengetahui tentang kondisi sekarang dan prospek ke depan dari perusahaan daripada calon investor.

Tipe kedua adalah *moral hazard*. *Moral hazard* adalah tipe asimetri informasi di mana satu atau lebih pihak pada transaksi bisnis atau transaksi potensial dapat mengamati kegiatan mereka dalam pemenuhan transaksi tapi pihak lain tidak dapat. Masalah ini muncul karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik perusahaan-perusahaan besar. Hal tersebut terjadi karena pemegang saham dan kreditor tidak dapat secara efektif mengamati secara langsung luas dan kualitas dari usaha manajer puncak berkerja atas kepentingan mereka. Oleh karena itu manajer bisa tergoda untuk melalaikan usaha, menyalahkan adanya kemunduran kinerja perusahaan karena faktor di luar kendalinya (Scott, 2009:318).

B. Corporate Governance

Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sementara dalam *corporate governance perception index* oleh *The Indonesia institute for corporate governance* mendefinisikan lebih sederhana mengenai *corporate governance*, yaitu serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai harapan para pemangku kepentingan (stakeholder). Manfaat *corporate governance* adalah:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai

akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

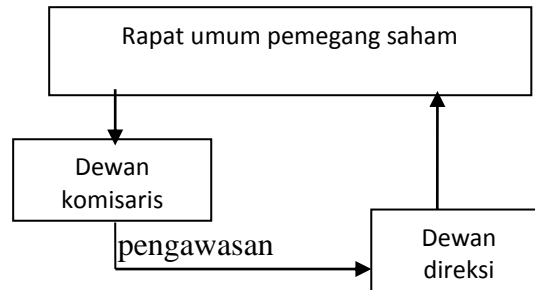
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. (Efendi,2008:15)

C. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Sistem hukum *Continental Eropa* mempunyai sistem dua tingkat atau *two tier system*. Disini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi), dimana dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dalam sistem *two tiers system*, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan direksi). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris, sehingga dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh melakiti perusahaan dengan pihak ketiga.

Gambar 2.1

Struktur Dewan Komisaris dan Dewan dalam Two tiers system yang diadopsi oleh Indonesia



D. Komisaris independen

Keberadaan komisaris independen telah diatur di Bursa efek Jakarta melalui peraturan BEI tanggal 1 juli 2000. Dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas, dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa criteria tentang komisaris independen adalah sebagai berikut (BEJ, 2000):

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Komite audit

Komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York stock exchange*

(NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan international ini, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002. Ikatan komite audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut.

Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menajlankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance diperusahaan-perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

E. Komite Manajemen Risiko

Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Selain itu Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kebijakan yang tepat yang menyangkut penilaian risiko dan manajemen risiko serta menelaah kecukupan, kelengkapan dan implementasi yang efektif terhadap proses manajemen resiko perusahaan dan merekomendasikan perbaikan bilamana diperlukan Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

F. Etnisitas

Dikaji dari sisi budaya, Moeljono mantan CEO Bank BRI, menyatakan ada hal penting dalam *corporate governance* yaitu *corporate culture*. *Corporate culture* merupakan sistem nilai (*value system*) yang ada pada individu-individu, nilai ini tumbuh didalam perusahaan dan digunakan sebagai sistem perekat (Effendi, 2008:8). Biasanya individu-individu yang menciptakan sistem nilai ini adalah para pendiri dan atau pemilik perusahaan, dimana sering kita jumpai budaya yang mereka ciptakan diwujudkan menjadi slogan-slogan perusahaan yang harus dimiliki dan diinternalisasikan oleh seluruh karyawan.

Pada beberapa penelitian, missal Gul (2006) dan Yatim *et al* (2006) yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan keberhasilan atau kekuatan internal *corporate governance* antara perusahaan yang dikendalikan oleh etnis masyarakat asli dan keturunan, dimana perusahaan yang dikendalikan masyarakat asli dianggap memiliki *corporate governance* lebih buruk.

G. Fee audit

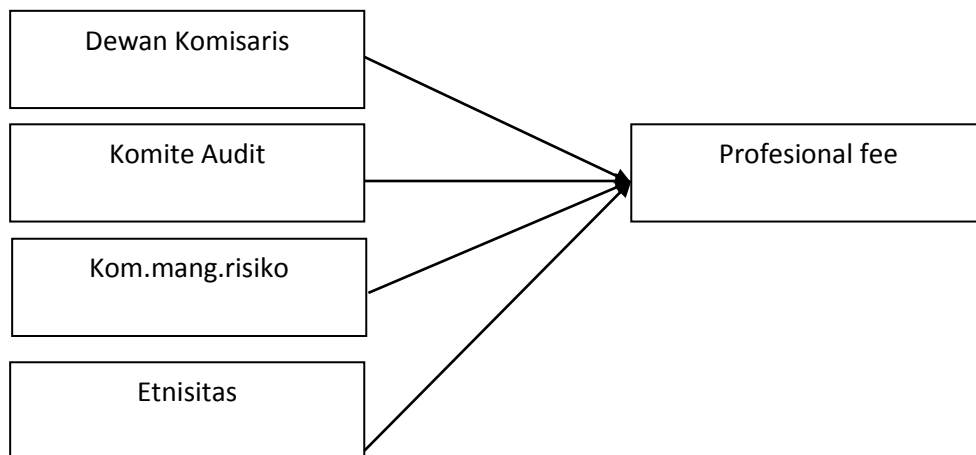
Fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor dari klien, nama kantor akuntan publik yang melakukan jasa audit, terlebih saat ini ada faktor regulasi/aturan tentang *fee* audit minimum yang disepakati oleh organisasi-organisasi akuntan/auditor.

Simunic (1980) menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit, dan kompleksitas audit (*subsidiaries, foreign listed*). Sementara menurut Sankaraguruswamy dan Whisenant (2003) *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa factor dalam penugasa audit seperti, keuangan klien (*financial of client*), ukuran klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*).

III. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam pengembangan hipotesis dalam penelitian ini mengembangkan kerangka konsep seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Rerangka Konsep Penelitian



A. Dewan komisaris dan *fee* audit

Beberapa pedoman tata kelola perusahaan juga menyatakan bahwa keandalan dari Dewan akan menurun perannya dan kemungkinan *governance* akan lebih lemah ketika CEO juga sebagai Dewan (Cadbury Committee, 1992). Lebih lanjut Dechow *et al* (1996) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba cenderung memilik CEO yang juga berfungsi sebagai Ketua Dewan. Hal tersebut menunjukkan kombinasi-kombinasi peran ini cenderung menurunkan atau mengganggu efektivitas dewan dalam fungsi melakukan pengawasan, pengendalian manajemen serta proses akuntansi keuangan. Akibatnya auditor perlu melakukan upaya audit yang lebih, dengan demikian maka *fee* audit semakin tinggi.

H1 : Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee audit*

B. Ukuran Dewan komisaris

Yatim *et al.* (2006) berpendapat juga bahwa terdapat kesulitan dalam mengorganisir dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak. Carcello dan Neil (2000) menemukan bahwa jumlah dari dewan komisaris secara

signifikan mempengaruhi kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Searah dengan Carcello dan Neil (2000), hasil penelitian yang dilakukan Beasley (1996) menunjukkan bahwa meningkatnya ukuran dewan komisaris, memungkinkan meningkatnya penipuan atas laporan keuangan. Karena dimungkinkan banyaknya dewan direksi tersebut semakin mempengaruhi proses pelaporan keuangan, tetapi kurang efektif dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Dengan demikian auditor eksternal menilai adanya pengendalian lingkungan internal yang masih lemah, sehingga jam audit lebih lama dan berakibat pada meningkatnya biaya audit eksternal.

H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee audit*

C. Intensitas Pertemuan

Intensitas pertemuan dewan komisaris juga memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaksanaan keuangan. Byrne (1996) berpendapat bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan melakukan kewajibannya dengan rajin dan tentunya bermanfaat bagi shareholder. Sementara (Lishenga.,2005) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris.

H3 : Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee audit*

H4 : keberadaan komite manajemen resiko berpengaruh terhadap *fee audit*

D. Komite Audit dan Audit Fee

Komite audit independen, sebagai sebuah struktur yang dibentuk dan bertanggung jawab pada direktur akan memanfaatkan posisi mereka sebagai sarana meningkatkan reputasi mereka sebagai seorang ahli dalam pengendalian keputusan (Fama dan Jensen, 1983). Kualitas audit secara umum didefinisikan kemampuan auditor mendeteksi dan melaporkan salah saji material keuangan (DeAngelo, 1981), dengan demikian sangat masuk akal bila keberadaan komite audit independen diharapkan dapat membuat kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi.

H5 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap *fee audit*

E. Ukuran Komite Audit

Braoitta (2000) dalam Yatim *et al* (2006) dan *Audit Committee Handbook* (2007) menyatakan bahwa rekomendasi jumlah komite audit konsisten dengan

keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit. Sesuai dengan rekomendasi dari BRC (1999), penelitian ini berpendapat bahwa komite audit yang lebih besar atau lebih banyak jumlah anggotanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berakibat pada rendahnya *fee* audit eksternal.

H6 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit

F. Intensitas Pertemuan

Penelitian Beasley *et al* (2000) menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan yang potensial melakukan penipuan akan melakukan pertemuan lebih sering daripada komite audit pada perusahaan atau industry yang lebih sulit melakukan penipuan. Abbott *et al.* (2003) menyatakan bahwa komite audit setidaknya melakukan pertemuan empat kali setiap tahun cenderung lebih cepat menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit.

H7 : Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit

G. Etnisitas dan Audit fee

Efek dari perbedaan budaya dan berbagai aspek budaya (yaitu, etnis dan demografi) telah ditunjukkan akan mempengaruhi praktik bisnis, organisasi, praktik akuntansi, pengungkapan dan jasa audit (Hofstede, 1980). Pasar modal Indonesia merupakan pasar modal yang masuk dalam katagori berkembang, dan belum kuat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pasar modal yang belum kuat cenderung masih banyak campur tangan pemerintah didalamnya, dan hal ini dianggap bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan.

H8: Etnis pemilik perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit.

IV. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fee* audit. Data *fee* audit diproksikan dengan 10% atas data *professional fee* atau *consultant fee* hal ini dilakukan karena beberapa perusahaan yang melakukan transparansi atas *fee* audit, *fee* audit tersebut hanya 8 – 10% dari total *professional fee*. Sama halnya dengan *fee* audit dalam penelitian Yatim, *et al* (2006), *fee* audit masih merupakan gabungan dari *fee* audit service dan *fee* non-audit service. Selanjutnya,

konsisten dengan beberapa model penelitian terdahulu, variable ini akan dilog naturalkan (ln).

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan manajemen resiko, komite audit, dan etnisitas. Sedangkan ada variabel kontrol yg digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, anak perusahaan, rasio utang atas asset perusahaan, dan kantor akuntan publik.

B. Teknik Analisis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regresi linear berganda, uji signifikansi parameter individual, dan koefisien determinasi. Metode Regresi Linear Berganda Metode regresi linear berganda, yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur corporate governance. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variable kontrol yang mengikuti model penelitian sebelumnya, Sedangkan variabel dependennya adalah *fee* audt. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LN}FEE = & a + b_1(\text{LN}ASSET) + b_2(\text{SUBS}) + b_3(\text{LEV}) + b_4(\text{BIG}4) + b_5(\text{BoardInd}) + \\ & b_6(\text{BoardSize}) + b_7(\text{BoardMeet}) + b_8(\text{RMC}) + b_9(\text{ACInd}) + \\ & b_{10}(\text{ACSize}) + b_{11}(\text{ACMeet}) + b_{12}(\text{Etnisitas}) + e \end{aligned}$$

keterangan:

| | |
|------------------|--|
| <i>LN</i> FEE | : logaritma natural dari <i>fee</i> audit (professional <i>fee</i>) |
| <i>LN</i> ASSET | : logaritma natural dari total aktiva |
| <i>SUBS</i> | : akar kuadrat dari jumlah anak perusahaan |
| <i>LEV</i> | : rasio hutang atas aktiva perusahaan |
| <i>BIG</i> 4 | : auditor Big 4 |
| <i>BoardInd</i> | : Jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris |
| <i>BoardSize</i> | : Jumlah anggota dewan komisaris |
| <i>BoardMeet</i> | : Jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris |
| <i>RMC</i> | : variabel dummy, 1 bila membentuk komite management risiko |
| <i>ACInd</i> | : Jumlah komisaris independen dalam komite audit |

- ACSize* : Jumlah anggota komite audit
ACMeet : Jumlah rapat yang diadakan komite audit
Etnisitas : variabel dummy, 1 bila dimiliki etnis masyarakat utama, 0 bila non-masyarakat utama

V. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistika Deskriptif

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian ditampilkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.

Statistik Deskriptif Struktur Corporate Governance, Entisitas dan Variabel kontrol

| Variabel | Min | Maks | Rata-rata | Std.deviasi |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-------------|
| Fee audit | 18.16 | 25.88 | 22.2553 | 1.57758 |
| Dewan komisaris independen | 1.00 | 6.00 | 2.2308 | .96283 |
| Ukuran dewan komisaris | 2.00 | 12.00 | 5.5705 | 1.78926 |
| Pertemuan DK | 2.00 | 12.00 | 5.0577 | 1.80050 |
| Komite manajemen risiko | .00 | 1.00 | .4615 | .50012 |
| K.A Independen | 1.00 | 2.00 | 1.1154 | .32051 |
| Ukuran KA | 3.00 | 6.00 | 3.4679 | .76555 |
| Pertemuan KA | 2.00 | 12.00 | 5.5883 | 1.85944 |
| Etnisitas | .00 | 1.00 | .5321 | .50058 |
| Ukuran perusahaan | 26.23 | 32.94 | 29.4715 | 1.23160 |
| Anak perusahaan | 3.00 | 30.00 | 8.4038 | 7.19926 |
| Leverage | .00 | .72 | .2355 | .16669 |
| KAP | .00 | 1.00 | .5513 | .49897 |

Sumber : Data olahan output spss

Berdasarkan tabel 5.1, dari 156 pengamatan, nilai rata-rata log natural variabel audit fee adalah 22,2553 dengan nilai minimum 18,16, nilai maksimum 25,88 dan standar deviasi 1,57758. Dewan komisaris independen memiliki jumlah minimum 1 dewan komisari dan maksimum 6 dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris atau jumlah dewan komisaris perusahaan memiliki jumlah minimal 2

dan jumlah maksimal 12 orang. Pertemuan dewan komisaris memiliki jumlah minimal 2 dan jumlah maksimal 12, hal ini dikarenakan ada beberapa perusahaan yang memiliki kebijakan pertemuan minimal 2 kali pertahun dan jumlah maksimal 12 ini dikarenakan ada beberapa perusahaan yang juga memiliki kebijakan bahwa rapat harus dilakukan setiap bulannya dalam satu periode. Komite Manajemen Risiko merupakan variabel dummy memiliki nilai rata-rata 0,4615 dengan nilai minimum dan maksimum 0 dan 1 dengan standar deviasi 0,50012. Komite audit independen nilai minimum 1 dan maksimum 2, hal ini dapat dijelaskan Karen adanya aturan bahwa paling sedikit harus ada 3 komite audit didalam perusahaan dan paling tidak ada 1 merupakan komite audit independen.

Ukuran Komite Audit memiliki nilai minimum 3 dan maksimum 6, hal ini terjadi karena kebijakan yang mengharuskan perusahaan minimal memiliki 3 komite audit termasuk komite audit independen, sedangkan batas maksimal tidak ada di dalam aturan, namun dalam hal ini ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit di atas 3 dan dalam hal ini yang paling banyak adalah 6 anggota. Pertemuan Komite audit memiliki nilai minimal 2 dan maksimal 12, sama halnya dengan pertemuan yang dilakukan dewan komisaris, beberapa perusahaan dalam annual reportnya menyatakan adanya kebijakan minimal anggota komite audit melakukan pertemuan 2 kali dalam 1 periode, dan dalam hal ini beberapa perusahaan melakukan pertemuan 12 kali dalam satu periode.

Etnisitas yang merupakan variabel dummy memiliki rata-rata 0,5321 dengan nilai minimum dan maksimum 0 dan 1 dengan standar deviasi 0,50058, hal ini menunjukkan dari seluruh sampel yang diamati, perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat keturunan lebih banyak daripada perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat asli.

Leverage atau rasio utang terhadap total asset memiliki nilai rata-rata 0,2355 dengan nilai minimum dan maksimum 0,00359 dan 0,72. Rata-rata sampel dalam penelitian hanya memiliki pinjaman sebesar 23.55% hal ini dapat dikatakan baik, karena dari total asset yang dimiliki 72.45% adalah milik dari perusahaan. Leverage maksimal sebesar 72% yang diartikan ada pula perusahaan yang dalam

struktur modalnya di atas 50% kegiatan perusahaan di biayai dari pinjaman. KAP yang merupakan variabel dummy memiliki nilai rata-rata 0,5513 dengan nilai minimum dan maksimum 0 dan 1 dengan standar deviasi 0,49897. Artinya nilai minimum mewakili perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP BIG 4 dan nilai maksimum mewakili perusahaan yang menggunakan jasa KAP BIG 4.

B. Koefisien Determinasi (R²)

Hasil adjusted R² sebesar 0.389, hal ini berarti 38.9% *fee* audit dapat dijelaskan oleh variasi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, pertemuan dewan komisaris, keberadaan komite manajemen resiko, independensi komite audit, ukuran komite audit, pertemuan komite audit dan variasi etnis yang memiliki perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 61.1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel independen dalam penelitian ini mengingat ada kemungkinan banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besaran *fee* audit.

C. Uji t

Dengan dilakukannya uji t dapat diketahui apakah variabel-variabel independen secara parsial dapat mempengaruhi variabel dependen (*audit fee*). Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel Uji Hipotesis

| No | Variabel | Beta | p-value | Keterangan |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Komisaris Independen | 0.273 | 0.004 | Hipotesis diterima |
| 2 | Ukuran Dewan komisaris | -0.12 | 0.896 | Hipotesis ditolak |
| 3 | Intensitas pertemuan DK | -0.10 | 0.890 | Hipotesis ditolak |
| 4 | Komite manajemen risiko | -0.151 | 0.045 | Hipotesis diterima |
| 5 | Komite audit independen | -0.164 | 0.023 | Hipotesis diterima |
| 6 | Ukuran Komite Audit | 0.107 | 0.117 | Hipotesis ditolak |
| 7 | Intensitas pertemuan KA | -0.199 | 0.006 | Hipotesis diterima |
| 8 | Etnisitas | 0.014 | 0.839 | Hipotesis ditolak |

| | | | |
|----------------|---------|------------------|--------|
| R ² | = 0.445 | Du | = 1.78 |
| p-value F | = 0.000 | Tingkat α | = 0.05 |
| Dw | = 1.935 | | |

Adapun persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 14.397 + 0.237X_1 - 0.12X_2 - 0.10X_3 - 0.151X_4 - 0.164X_5 + 0.220X_6 - 0.169X_7 + 4.266E-02X_8 + 0.242X_9 + 1.643E-02X_{10} + 1.393X_{11} + 1.169X_{12} + e$$

Keterangan

- Y = Audit *fee*
- X1 = Komisaris Independen
- X2 = Jumlah dewan komisaris
- X3 = Pertemuan dewan komisaris
- X4 = Komite manajemen resiko
- X5 = Komite audit independen
- X6 = Jumlah komite audit
- X7 = Pertemuan komite audit
- X8 = Etnisitas
- X9 = Ukuran perusahaan (asset)
- X10 = Anak perusahaan (sub)
- X11 = Rasio *Leverage*
- X12 = BIG 4

D. Uji F

Dalam penelitian ini nilai P-value F adalah 0.000, dengan demikian maka secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen *fee* audit.

E. Interpretasi Hasil

Variabel Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal. Hipotesis Ho ditolak, dan hipotesis Ha diterima karena tingkat signifikansi di bawah 0.05. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Beasley (1996) dan Dechow *et al* (1996), hasil penelitian keduanya menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih independen akan menurunkan risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor sehingga akan

mengurangi *fee* audit. Sedangkan Sullivan (1999) menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antar karakteristik dewan komisaris dengan keputusan penetapan harga oleh auditor eksternal.

Tingkat signifikansi p-value di atas 0.05, dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak, artinya ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit eksternal. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Beasley (1996), Abbot *et al* (2001;2003) hasil penelitian mereka menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih sedikit akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar, dimana dewan komisaris yang berukuran lebih besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan.

Dari hasil analisis diketahui p-value di atas 0.05, dengan demikian maka H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya variabel pertemuan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit eksternal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Yatim *et al* (2006) bahwa *fee* audit tidak dipengaruhi banyak tidaknya pertemuan yang dilakukan dewan komisaris. Hal ini diindikasikan karena biasanya materi rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah materi-materi investasi bisnis, tidak sering pada pelaporan keuangan, sehingga intensitas rapat dewan komisaris tidak memengaruhi hasil audit dan tidak ada pengaruhnya terhadap *fee* audit.

Tabel diatas menyatakan bahwa tingkat signifikansi p-value dibawah 0.05, dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya komite manajemen risiko berpengaruh signifikan dan negative terhadap *fee* audit eksternal. Searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et al* (2006), yang juga mendapat temuan penelitian bahwa keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat signifikansi p-value di bawah 0,05, dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_5 diterima, artinya variabel komite audit independen memiliki pengaruh dan negative terhadap *fee* audit eksternal. Hasil ini mendukung pendekatan berbasis risiko untuk jasa audit. Suatu komite audit yang independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses

pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan (Abbott *et al.*,2003).

Dengan tingkat signifikansi p-value di atas 0.05, dengan demikian maka H_0 diterima dan H_6 ditolak, artinya variabel ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *fee* audit eksternal. Penelitian ini searah dengan hasil penelitian Huang *et al* (2004) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit dan kualitas audit, karena tidak ada pengaruh terhadap kualitas maka tidak berpengaruh pula pada *fee* audit eksternal.

Dari tabel diatas diketahui tingkat signifikansi p-value di bawah 0.05, dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_7 diterima, artinya pertemuan Komite audit memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap *fee* audit eksternal, artinya semakin sering komite audit melakukan rapat maka *fee* audit eksternal akan semakin rendah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi p-value di atas 0.05, dengan demikian H_0 diterima dan H_8 ditolak, artinya etnisitas tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya *fee* audit eksternal, perlu diingat etnisitas merupakan *dummy* variabel dimana nilai 1 untuk perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat asli dan 0 untuk masyarakat keturunan (china / Tiong Hwa). Hipotesis yang diterima menyatakan bahwa masyarakat asli tidak akan mengeluarkan biaya audit yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang dimiliki etnis masyarakat keturunan. Hasil ini konsisten dengan apa yang didokumentasikan oleh Yatim *et al* (2006) dimana tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel etnisitas dan *fee* audit eksternal, dan Yatim *et al* (2006) menyatakan walaupun tidak signifikan tetapi hasil penelitiannya menyimpulkan perusahaan yang dikendalikan etnis masyarakat asli mengeluarkan biaya audit yang lebih rendah daripada etnis masyarakat utama.

F. Pembahasan Variabel Kontrol

Auditor yang melakukan audit di perusahaan besar akan menghabiskan waktu lebih banyak dan sumber daya yang lebih pula untuk meninjau operasi klien karena perusahaan membutuhkan waktu berjam-jam untuk memeriksa. Semakin besar ukuran perusahaan maka jumlah bukti yang harus dikumpulkanpun akan semakin banyak sehingga memerlukan prosedur audit tambahan dan secara

otomatis waktu yang diperlukan untuk melakukan audit akan semakin banyak yang pada gilirannya akan berpengaruh pada *fee* audit yang lebih besar.

Sebagaimana tampak pada tabel diatas menunjukkan sub tidak berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal, hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Yatim *et al* (2006) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel Sub dan *fee* audit, sementara penelitian Simunic (1980) menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan antara subsidiaries dan *fee* audit eksternal.

Hasil regresi sebagaimana tampak pada tabel menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *fee* audit. hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Francis dan Stokes (1986) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *fee* audit berhubungan dengan *leverage*.

Hasil dari penelitian ini reputasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap *fee* audit. Hasil ini mendukung hasil penelitian Francis dan Simon (1987). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa KAP yang memiliki reputasi baik (dalam penelitian ini di proksi dengan Big 4) menerima *fee* audit lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4, atau dengan kata lain *fee* audit akan ditetapkan lebih tinggi untuk KAP yang masuk kategori The Big 4 dibandingkan Non The Big 4.

VI. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan independensi dewan komisaris berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap *fee* audit. sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tanggung jawab komisaris independen meliputi pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan peningkatan kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban sosial kepada stakeholder serta untuk melindungi reputasi pribadi mereka.

Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit, hal yang bisa menjelaskan hal ini adalah adanya kemungkinan pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan

kekerabatan menyebabkan hilangnya independensi dan berdampak pada *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan atas keberadaan komite manajemen risiko adalah komite ini menunjang peningkatan kontrol atas risiko pada suatu perusahaan, sehingga dapat meminimalkan penilaian risiko oleh auditor eksternal, dengan demikian maka penurunan penilaian risiko oleh auditor eksternal akan berdampak pada semakin kecilnya lingkup audit sehingga *fee* audit yang dikenakan juga bisa lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak memiliki komite manajemen risiko.

Independensi komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal. Dalam penelitian ini independensi komite audit berpengaruh negative, hal yang memungkinkan dapat menjelaskan temuan ini adalah komite audit yang lebih independen akan mempertahankan reputasinya sebagai komite audit yang independen yang *expertise*. Sehingga hal ini berdampak pada kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang meningkat, dengan demikian maka risiko kesalahan salah saji semakin kecil, hal ini berdampak pada lingkup pengujian auditor eksternal semakin kecil pula, yang pada gilirannya akan berdampak pada penentuan *fee* audit yang lebih rendah.

Ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal yang memungkinkan menjelaskan hal ini adalah keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki komite audit sesuai dengan regulasi yang ditentukan BAPEPAM, dengan ketentuan jumlah minimal komite audit adalah tiga orang.

Intensitas rapat yang dilakukan komite audit memiliki pengaruh terhadap *fee* audit eksternal, dimana pengaruhnya adalah negative atau berbanding terbalik. Hal yang memungkinkan dapat menjelaskan temuan ini adalah rapat yang dilakukan oleh komite audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan pada beberapa pertemuan komite audit pasti terdapat pertemuan komite audit dengan pihak auditor eksternal, dimana komite audit perusahaan akan lebih mempermudah kerja dari auditor eksternal, hal ini berdampak pada waktu kerja auditor eksternal akan semakin cepat karena keaktifan dari komite audit yang *diligent*. Dengan demikian semakin singkatnya waktu audit ini akan berpengaruh pada penentuan *fee* audit yang lebih rendah dibandingkan bila jam

kerja auditor eksternal lebih lama tanpa informasi yang jelas dan lengkap saat pertemuan komite audit dan auditor eksternal

Selanjutnya, temuan dalam penelitian ini adalah etnisitas yang tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Hal yang memungkinkan dapat menjelaskan temuan ini adalah adanya regulasi dalam bentuk perundang-undangan yang diwujudkan dalam undang-undang persamaan hak dan kewajiban antara masyarakat utama dan masyarakat keturunan pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Ada kemungkinan terjadi perbedaan bila penelitian dilakukan sebelum ada regulasi, dimana perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat utama diprioritaskan baik dalam mendapatkan investasi maupun dukungan dari pemerintah. Dengan demikian sangat memungkinkan *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat utama akan lebih tinggi dari pada yang dimiliki masyarakat keturunan, karena perusahaan mereka pasti memiliki risiko lebih tinggi dan struktur yang kurang baik karena adanya campur tangan pemerintah di dalamnya.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel masih sedikit dan periode pengamatan hanya dua tahun.
2. Dalam penelitian ini *fee* audit masih diproksi menggunakan *professional fee*
3. Struktur *governance* masih terbatas pada karakteristik dewan komisaris dan komite audit.

C. Saran

Untuk penelitian mendatang disarankan untuk:

1. Memperpanjang periode pengamatan pada populasi yang berbeda, karena terkait struktur *governance* ada kemungkinan terjadi beberapa regulasi dalam struktur *governance*, sehingga periode pengamatan memungkinkan untuk mendapatkan temuan penelitian yang berbeda.
2. Menggunakan *fee* audit yang sebenarnya.
3. Lebih memperkaya variabel dari struktur *corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G.F. dan Raghundanan, K. 2003, "The Association Between Audit Committee Characteristics and Audit Fees", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 22 No. 2, pp.17-32.
- Abbott, L. J., S., Parker. dan G, Peters.F. 2004, "Audit committee characteristics and Restatements", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 23 No. 1, pp. 69-87.
- Beasley, M.S. 1996, "An empirical analysis of the relation between the boards of directors composition and financial statement fraud", *The Accounting Review*, Vol. 71 No. 4, pp. 443-465.
- Byrne, J. 1996, "And you thought CEOs were overpaid", *Business Week*, August 26. <http://www.businessweek.com/archives/1996/b3490063.arc.htm>
- Cadbury Committee, The. 1992, *Report on the financial aspects of corporate governance*. Gee and Company Limited, London.
- Carcello, J.V. dan Neal, T. L. 2000, "Audit committee composition and auditor reporting", *The Accounting Review*, Vol. 75 No. 4, pp. 453 – 467.
- Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Neal, T.L. dan Riley, R.A. 2002, "Board characteristics and audit fees", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 19 No. 3, pp. 365-384.
- Dechow, P.M., Sloan, R.G. dan Sweeney, A. 1996, "Causes dan consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 13, pp. 1-36.
- Eisendhard. 1989. Agency Theory: An Assessment dan Review. *Academy of Management Review*. Vol 14. No 1. 57-74
- Effendi, M.Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Fachriyah, Nurul. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fee Audit pada Kantor Akuntan Publik Malang. *Thesis Universitas Bryawijaya Malang*. (Tidak dipublikasikan)
- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jilid I. FCGI, Edisi ke-3.

- FCGI. 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II*. FCGI. Edisi ke-2.
- Francis, J.R dan Simon, D. 1987, "A test of audit pricing in the small-client segment of the audit US audit market", *The Accounting Review*, Vol. 62, pp. 145-57
- Francis, J.R dan Stokes. 1986. Audit prices, product differentiation and scale economics: Further evidence from Australian market. *Journal of Accounting Research*. Vol.24(2) 383-393.
- Gul, F. A. 2006, "Auditors' Response to Political Connections dan Cronyism in Malaysia". *Journal of Accounting Research*. Vol.44, No.5
- Hofstede, G. H. (1980), *Culture's consequences: international differences in work related values*, Sage Publications, Beverly Hills, CA.
(Google Books)
- Huang. Wei., Hua dan Sheela Thiruvadi. 2004. "Audit Committee Characteristics and Corporate Fraud." *International Journal of Public Information Systems*, h. 7 1-82.
- Organizational for economic co-operation dan development (OECD). 1998. *Organizational for economic co-operation dan development (OECD) principles of corporate governance*
- Scott, W.R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Canada: Pearson Prentice-Hall.
- Simunic, D. (1980), "The Pricing of Audit Services: Theory Dan Evidence", *Journal of Accounting Research*, Vol. 18 No. 1, pp. 161-190
- Sankaraguruswamy dan Whisenant. 2003. Pricing Initial Audit Engagements: Empirical Evidence Following Public Disclosure of Audit Fees, *working paper*, Singapore Management University, pp 1-47
- Surat keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2008. No. KEP.024/IAPI/VII/2008.
- Sullivan, O.N. 1999. Board Characteristics dan audit pricing post-Cadbury : a research note, *The European Accounting Review*, 8:2, 253–263

Yatim, Puan., Pamela Kent dan Peter Clarkson. (2006).“Governance Structures, Ethnicity, dan Audit Fees of Malaysian Listed Firms” *Business Paper School of Business, Bond University*